

PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM: KEBIJAKAN STRUKTURAL, MANUVER EKONOMI POLITIK, TERKAIT EKSISTENSI PEMBURU RENTE

Oleh :
Liana Endah Susanti

Universitas Soerjo Ngawi
Email : endahliana112@gmail.com

Abstrak

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau pembebasan lahan merupakan proses yang tidak terpisahkan dalam pembangunan infrastruktur. Keputusan pemerintah tersebut merupakan pergerakan yang baik guna menyongsong evolusi berkelanjutan di berbagai sektor. Ditengah gencarnya usaha pemerintah mengubah wajah Indonesia, santer terdengar berita tertangkapnya para pemburu rente yang secara bertahap melakukan pemerasan terselubung terhadap keuangan negara. Kompleksnya permasalahan pembangunan infrastruktur dan keadaan ekonomi suatu negara semacam ini bukan hal baru, sayangnya koneksi dan benteng pemburu rente telah mengakar dalam kesatuan dengan sebutan kerjasama, namun bersifat parasitisme. Pada akhirnya mereka bebas melenggang karena diberi kuasa. Sudah saatnya sebuah negara tersadar bahwa ihwal pemburu rente bukan lagi pembahasan yang bermuatan surplus ataupun defisit, namun tentang bagaimana sebuah negara menyingkirkan budaya kalam dalam sebuah upaya pembangunan ekonomi yang mereka gadang-gadangkan. Terlebih lagi, kawasan Indonesia bukan negara miskin mengingat melimpahnya berbagai basis sumber daya. Improvisasi arah keuangan dan kekayaan-kekayaan tersebut masih terlalu berlebihan serta belum mampu efektif dan efisien. Kebijakan struktural yang diwacanakan pemerintah sudah sepantasnya melakukan manuver baik dalam segi ekonomi maupun politik untuk menyusun strategi guna menghadapi peradaban baru , namun haruslah kearah yang tepat agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.

Kata kunci : Pengadaan Tanah, Pembangunan Infrastruktur, Kebijakan Struktural, Manuver Ekonomi Politik dan Perburuan Rente

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur adalah proyek spektakuler yang dilakukan pemerintah dari suatu negara. Hasil kajian Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPIP) menyebutkan masalah pembebasan lahan menempati urutan kedua tertinggi setelah masalah perencanaan dan penyiapan.¹ Hal ini terjadi mengingat pembebasan lahan menyangkut hajat hidup orang banyak, serta kehidupan sosial-ekonomi mereka pasca pembebasan lahan tersebut dilakukan. Di sisi lain, praktik perburuan rente adalah hal yang sinkron terjadi dan sangat berkemungkinan untuk tumbuh subur di negara berkembang di kawasan Asia terlebih Indonesia (Windradi & Wahyuni, 2018). Pengeluaran negara berkembang yang mencanangkan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang tidak terbatas jumlahnya adalah sasaran empuk bagi pemburu rente dengan mengatasnamakan kerjasama.

Kepentingan global dalam target bagi negara yang ingin menyetarakan peradabannya dengan negara-negara adikuasa boleh jadi merupakan solusi pengentasan kemiskinan di negara tersebut. Perubahan persepsi negara-negara digdaya tentu akan berubah, laju pertumbuhan ekonomi akan meningkat, serta akan memperdekat jarak kurs antara mata uang lokal dan mata uang dunia. Lain halnya jika kita menyelinap lebih jauh tentang bagaimana pengalokasian dana untuk membawa kemajuan peradaban tersebut. Tentu akan menemukan praktik dengan benang-benang merah yang sukar untuk diurai.

Dalam kerangka perubahan global dan adaptasi manusia, perubahan penggunaan lahan dan kebijakannya telah menjadi salah satu isu panas dalam penelitian.² Konteks kebakuan sebuah kebijakan membuat apa yang berada di depannya seolah mampu untuk disingkirkan. Terlebih dalam masalah hukum ekonomi pembangunan yang menyangkut infrastruktur semacam ini, amat susah

1 <https://kpip.go.id/opini/tanah-untuk-kepentingan-umum/>

2 Roxana Julia, Faye Duchin "Land Use Change and Global Adaptations to Climate Change" (Switzerland : sustainability journal, 2013)

membedakan mana kepentingan publik, dan mana yang menjadi hak masyarakat seandainya lahan mereka diambil alih kepemilikannya oleh pihak terkait.

Pemburu rente yang kian eksis dibalik layar pembangunan infrastruktur negara-negara berkembang layaknya Indonesia, sangat cepat lalu begitu saja dalam pemberitaan media massa. Pihak penyelenggara, pemerintah, aparaturnya dan penegak hukum seolah bungkam seribu bahasa dalam paradigma kelabu tersebut. Lalu rakyat Indonesia yang memiliki intelektual cenderung apatis dengan keadaan negaranya cenderung berpura-pura tidak mengerti, dan lebih parah lagi masih banyak yang memang benar belum mengerti (Bahroni, 2018).

Praktik *rent seeking* sendiri bukan suatu yang bisa ditolerir, ditambah lagi dengan budaya korupsi yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun setiap periode pemerintahan. Ini merupakan situasi dimana keuangan negara mengalami kebocoran terselubung, yang tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan krisis moneter kembali terjadi. Bukan tidak bisa dibasmi, hanya saja Indonesia belum mampu menjadi *owner* yang baik bagi elemen-elemen terdekatnya. Secara disadari maupun tidak, Indonesia mengarah kembali ke arah kapitalis yang mana berbagai sendi ekonominya dikuasai oleh para pemburu rente. Agensi ini pun memiliki pengaruh yang signifikan terhadap eksistensi dari struktur regulasi, deregulasi dan re-regulasi merupakan salah satu manifestasi bagaimana agensi bisa mempengaruhi struktur. Demikian pula ketidakmampuan struktur melegitimasi sanksi atas kebijakan yang dikeluarkannya merupakan bukti lain bahwa dualitas hubungan struktur-agensi di dalam sektor ini memiliki keberlakuannya.³

Alisisis kemampuan Indonesia dalam mengalokasikan anggarannya selalu mendapat temuan yang buruk terkait dengan hasil. Terminologi *rent seeking* dalam institusi negara merujuk pada perilaku pejabat publik dan politisi dalam memutuskan alokasi anggaran publik (APBN-APBD), atau kebijakan yang ditujukan untuk publik

³ Ricardi S. Adnan "Dinamika Struktur-Agensi dalam Perkembangan Industri Otomotif Indonesia" (Pusat kajian sosiologi : Jurnal Sosiologi MASYARAKAT, Januari 2014) Vol. 19, No. 1, 77-92.

dengan motivasi mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompok yang berimplikasi pada merugikan kepentingan publik, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.⁴

Berbagai dampak dan bahaya implementasi perburuan rente sangat mengancam suatu negara khususnya dalam segi moneter terlebih kemungkinan serius lain yaitu menghambat pertumbuhan ekonomi, maka dari itu baik kiranya Saya melakukan kajian yang berjudul **“PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM : KEBIJAKAN STRUKTURAL, MANUVER EKONOMI POLITIK, TERKAIT EKSISTENSI PEMBURU RENTE”**

Rumusan Masalah

1. Apa saja dampak pembangunan infrastruktur terhadap kehidupan masyarakat dan pembangunan ekonomi sebuah negara?
2. Mengapa suatu negara cenderung melibatkan pemburu rente dalam pembangunan infrastruktur dan ekonomi?
3. Bagaimana pengaruh eksistensi pemburu rente terhadap kesehatan kehidupan ekonomi suatu negara?

PEMBAHASAN

1. **Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Kehidupan Masyarakat Dan Pembangunan Ekonomi Sebuah Negara**

Infrastruktur kerap digadang-gadang menjadi salah satu penghambat perkembangan ekonomi suatu negara yang hendak mengembangkan sayapnya. Strategi yang dilakukan pemerintah dengan merombak wajah Indonesia melalui pembangunan infrastruktur adalah suatu usaha yang perlu diapresiasi. Peningkatan usaha ini diharapkan mampu mendapat respon positif dari berbagai sektor termasuk peningkatan pendapatan negara yang akan berdampak pada kemakmuran masyarakat. Hal inilah yang akan memberi bukti efektivitas dan efisiensi proyek pemerintah tersebut.

⁴ Andi Irawan “Rent Seeking Para Pejabat Publik” (Jawa Pos : Indonesia Corruption Watch ,2008)

Seperti yang dikemukakan Bappenas yang ditulis oleh Wahyuni (2009) menyatakan bahwa secara umum paling tidak terdapat 3 dimensi relasi antara ekonomi dan infrastruktur, yaitu:

1. Kegiatan ekonomi, seperti halnya keberadaan jalan, jembatan, listrik, dan telepon yang mendasari terciptanya transaksi dalam perekonomian
2. Infrastruktur juga merupakan input produksi, seperti halnya penggunaan listrik
3. Untuk proses produksi di semua industri
4. Akses terhadap infrastruktur menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini misalnya; peran air minum dan sanitasi yang baik, layanan transportasi dan listrik yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat modern.

Mengutip penjelasan dari Yang Zhoua, Liying Guoc dan Yansui Liua “*Land policy innovation and land consolidation are closely related to poverty alleviation and development*”⁵, bahwa inovasi kebijakan pertanahan dan konsolidasi lahan terkait erat dengan pengentasan kemiskinan dan pembangunan. Hal ini sangat masuk akal dalam segmentasi pertumbuhan ekonomi yang membutuhkan infrastruktur, sebab mudahnya mobilitas penduduk dalam segala sektor, apalagi proses awal sebuah produksi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan bahan yang membutuhkan jalur transportasi yang mumpuni dalam perolehannya, sumber energi listrik, dan kemudahan dalam mendapatkan sumber air. Penurunan biaya pengiriman berbagai komoditas akan menambah kesejahteraan pedagang dan masyarakat. Faktor lain yang mendukung adalah perbaikan pendidikan, kesehatan dan tata sosial yang baik untuk keperluan terkait.

Secara umum, infrastruktur sangat berperan aktif dalam setiap sendi kegiatan ekonomi. Namun perlu digaris bawahi bahwa semua hal pasti mempunyai dampak baik dan buruk. Terbukti dengan hadirnya jalan tol Trans-Jawa perlahan mampu menghidupkan kota-kota kecil yang dilaluinya. Banyak usaha kecil menengah

⁵ Yang Zhoua,b, Liying Guoc,d,, Yansui Liua “Land consolidation boosting poverty alleviation in China: Theory and practice” (Elsevier : *Land Use Policy*) Indexed by Scopus [Volume 82](#), March 2019, Pages 339-348

(UKM) yang bermunculan sebagai dampak dari peralihan profesi para petani yang sawahnya terdampak pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol tersebut (Aulia & Kawuryan, 2018). Begitupula dengan pulau Sumatra dan Papua, pemerataan sumber energi listrik mulai dirasakan masyarakat pedalaman, serta memperbaiki keadaan ekonomi mereka. Sanitasi yang baik juga sangat membantu masyarakat Papua, sehingga sudah tidak perlu lagi ke sungai guna memenuhi kebutuhan yang berhubungan dengan air (MCK).

Kembali pada probabilitas adanya dampak baik dan buruk, pembangunan infrastruktur juga mengakibatkan penurunan pendapatan bagi pengusaha di ruas jalan penghubung antar kota dan antar provinsi. Sebut saja rumah makan, toko oleh-oleh dan pedagang di sepanjang jalan yang sebelumnya dilalui bus dan kendaraan pribadi sebelum adanya jalan tol. Pendapatan mereka dipastikan menurun drastis, bahkan banyak rumah makan yang gulung tikar. Hal ini dikarenakan asumsi mengenai perilaku ekonomi yang dilakukan masyarakat yang secara teknis akan memilih suatu hal yang lebih mudah, cepat, nyaman dan murah akan menyugesti mereka untuk memilih melalui jalan tol dibandingkan jalan antar kota atau provinsi.

Jalan atau infrastruktur yang baik selalu menjadi *base* bagi investasi yang makin lancar sirkulasinya.⁶ Sederhana saja, infrastruktur yang baik akan menunjang segala sektor maka akan banyak investor yang melirik. Urgensi infrastruktur adalah fasilitas yang memang dibuat untuk menunjang kepentingan publik. Namun harapan besar pengadaannya tidak hanya untuk itu. Sejak tahun 1960-an, intensitas kegiatan antropogenik, seperti pembangunan infrastruktur dan percepatan *urban sprawl* telah menyebabkan kerugian besar dari sektor lahan pertanian di seluruh dunia.⁷ Index dampak eksternal secara komparatif dari penggunaan lahan pertanian aktif mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian dan juga memperkeruh beban lalu

6 Muhammad Ridha, "Ekonomi Politik Pembangunan Infrastruktur Dan Kepentingan Kapital" (Jurnal Politik Profetik, 2016) Volume 04, No. 1

7 (Chen, 2007; Su et al., 2014; Liu et al., 2014) dalam jurnal terindex scopus "Land Use Policy"

lintas, pemborosan energi dan fakta-fakta lain.⁸ Berkurangnya daerah persawahan dan perkebunan akibat pengadaan tanah secara tidak langsung menggusur mata pencaharian masyarakat pedesaan atau pelosok. Ditambah lagi kebanyakan masyarakat pelosok bekerja hanya sebagai buruh tani atau buruh perkebunan bukan petani, yang secara otomatis menghentikan mata pencaharian mereka meskipun tidak secara total. Pengecualian timbul dari kalangan pengusaha, pedagang dan pekerja swasta. Mereka akan semakin terbantu dengan adanya jalan tol atau lebih dikenal dengan jalur trans ini.

Kemiskinan regional perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah, hal ini sangat berpengaruh dalam pemerataan pendapatan perkapita penduduk di Indonesia. Sudah menjadi ihwal penting bagi masyarakat untuk merubah budaya yang lebih suka menjadi buruh karena tidak mampu dalam berbagai segi, sebut saja pendidikan dan finansial. Faktor yang sangat penting lainnya adalah sistem budaya yang masih kental di era milenial ini. Skema mengenai untuk siapa dan bagaimana penanganan jangka panjang pemerintah dalam hal pembangunan infrastruktur jangan sampai hanya jadi agenda.

Ketergantungan masyarakat Indonesia pada penyedia lapangan pekerjaan menyumbang alasan kemalasan masyarakat dalam memulai usaha baru pasca lahan mereka terdampak pengadaan tanah. Ditambah lagi dengan ekonomi terpusat yang seolah menjadi figur negatif bagi masyarakat. Logikanya akan banyak investor yang menginvestasikan dananya untuk membangun berbagai industri, usaha, dan proyek besar disana. Meskipun banyak lapangan pekerjaan baru, namun jika kondisi masyarakat tidak mampu memenuhi persyaratan sebut saja dalam segi pendidikan maka tenaga bahkan keterampilan merekapun tidak akan berguna. Selain itu, proyeksi lingkungan perkotaan yang diagungkan sebagai penunjang adanya

8 Jiang Fang 1,2 , Liu Shenghe 1 , Yuan Hong 1,2 , Zhang Qing 1,2 “Measuring Urban Sprawl In Beijing With Geo-Spatial Indices” *Journal of Geographical Sciences (J GEOGR SCI)* October 2007 17(4):469-478

pembangunan infrastruktur di berbagai daerah seperti pembangunan mall, pabrik industri, proyek properti dan masih banyak lagi akan semakin menggusur lahan terbuka hijau. Terlepas dari hingar-bingar dan keuntungan dari pembangunan infrastruktur dari segi ekonomi dan pendapatan negara, infrastruktur dalam latar belakang layanan publik dapat berdampak negatif dengan kondisi ekologis lingkungan. Akibatnya kerusakan lingkungan semakin kompleks dan sering terjadi.

2. **Sebab Suatu Negara Cenderung Melibatkan Pemburu Rente Dalam Pembangunan Infrastruktur Dan Ekonomi**

Perlu diingat bahwa pembangunan infrastruktur bukan proyek main-main yang diselenggarakan untuk memperbaiki mutu Indonesia atau lebih tepat disebut “manuver ekonomi” pemerintah. Sayangnya justru timbul berbagai pihak yang kerap bermain-main dalam implementasinya. Negara berkembang sebagaimana yang kita ketahui bersama pasti memiliki agenda untuk memperbaiki keadaan bangsanya, sisi negatifnya adalah mereka cenderung mau menggelontorkan uang sebarang yang diminta pihak kontraktor yang lebih tepat disebut sebagai mafia. Definisi korupsi adalah gambaran sederhana dalam literatur pengemban misi publik dari kalangan eksekutif yang memiliki peran dalam pembangunan infrastruktur tersebut. Meskipun dalam konteks swasta, kebanyakan pihak *rent seeker* memegang kekuasaan lebih dalam kegiatan operasionalnya. Definisi tata kelola juga sangat terkait dengan negara. Modelnya adalah ditetapkan sebagai sistem “perdagangan ekonomi terbuka” yang memungkinkan adaptasi global untuk mendorong keputusan alokasi lahan. Spesialisasi regional dalam produksi pertanian dan pola penggunaan lahan yang terkait ditentukan oleh keunggulan komparatif yang dipengaruhi oleh pertumbuhan permintaan dan perubahan iklim kondisi, dari pada nilai elastisitas eksogen.⁹

Pemerintahan adalah apa yang dilakukan oleh negara, tetapi mengidentifikasi bidang tata kelola yang menjadi fokusnya bermasalah karena memerlukan asumsi

⁹ Roxana Julia, Faye Duchin “Land Use Change and Global Adaptations to Climate Change” (Switzerland : sustainability journal, 2013)

spesifik tentang apa yang seharusnya dilakukan negara untuk dilakukan.¹⁰ Pernyataan klasik mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh negara “baik” ini terbentur keharusan menyetarakan kondisi internal dengan negara-negara lain. Prospek ekonomi secara tidak langsung merupakan dampak dari kehidupan sosial suatu negara. Transformasinya mengarah pada penggunaan sistem kontraktor maupun investor dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Celah inilah yang membuka peluang besar bagi para pemburu rente.

Sistem kerja terselubung mereka yang sangat rapi terbingkai dalam kebijakan kerjasama menjadi sesuatu yang diketahui, namun sangat semu. Sifat semu inilah yang akhirnya menimbulkan implikasi “kewajaran” dalam konteks kerjasama tersebut. Meskipun fokus mereka adalah korupsi, logika esensial yang mereka buat bisa siap diterapkan pada fenomena pencarian perburuan rente yang lebih luas.¹¹ Robison dan Hadiz (2004) menjelaskan bahwa kekuatan mereka sesungguhnya adalah kekuatan oligarkhi lama yang merupakan kroni-kroni Soeharto, sebagaimana dikemukakan bahwa:

“Setelah kekuasaan Soeharto berakhir pada tahun 1998, oligarki tidak lantas berakhir, bahkan semakin meluas dan bersinergi dengan sistem politik demokrasi. Para oligarki yang sebelumnya merupakan kroni Soeharto menyebar dan bermetamorfosa dalam wajah demokrasi melalui partai-partai politik yang merupakan sarana kendali atas kekuasaan yang dengan demikian juga akses pertahanan dan pemupukan kekayaan”.

Kecenderungan masyarakat yang lemah dalam segi *civil society* akan berpengaruh dalam segala sektor di suatu negara. Yoshihara Kunio menyebut bahwa kebanyakan negara-negara di Asia Tenggara khususnya Indonesia, menjalin

10 Mushtaq H. Khan “Corruption, Governance and Economic Development” (in Jomo, KS and Ben Fine (eds) 2004. *The New Development Economics* . New Delhi: Tulika Press and London: Zed Press)

11 Jomo K.S. and Mushtaq Khan, *Rent-Seeking in Southeast Asia* : “Funny Money: Fiscal Policy, Rent-seeking, and Economic Performance in Indonesia” (Cambridge University Press, Cambridge, 2000) , pp. 248-273

hubungan bisnis dengan *rent seekers* sebagai implemetasi dari kapitalisme semu.¹² Kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan banyak memikat hati, karena pemerintah suatu negara hanya diminta untuk menyerahkan sumberdaya yang mereka miliki ataupun bentuk lainnya seperti proteksi dan kebebasan kebijakan sebagai pihak pelaksana. Tapi bagi Saya, apa yang terjadi saat ini lebih dari pada itu. Teori-teori terdahulu yang membahas ihwal *rent seeking* tidaklah keliru, namun kerap melupakan sifat asli orang Indonesia tentang “harga diri”. Pertama, ketika seseorang terjun dalam dunia pemerintahan, secara otomatis mereka juga harus mempunyai partisipan sebagai kawan untuk memerangi lawan. Disanalah mereka mempunyai harga diri bersama sebagai status ekonomi tertentu, untuk dijaga reputasinya. Sifat saling menjaga reputasi dan membawa keuntungan yang dapat dibagi bersama inilah yang akhirnya menimbulkan kapitalisme semu seperti yang disebutkan sebelumnya.

Kedua, *maind set* bahwa memperkaya diri dianggap sebagai nilai prestis agar disegani. Hal ini diuntungkan dengan sifat anggaran pembangunan yang agak lebih bebas dan karena itu lebih sering dipolitisasi dari pada anggaran rutin dalam beberapa kementerian dan otoritas daerah sejauh mampu bersaing untuk alokasi.¹³ Atau dengan kata lain lebih mudah untuk dimanipulasikan. Kebutuhan masyarakat akan infrastruktur dijadikan sebagai alih-alih mereka untuk melobi kekuasaan. Tidak heran jika pemerataan pendapatan perkapita yang jadi janji politik mereka belum terealisasi hingga saat ini.

Pim Heijnen dan Lambert Schoonbeek (2019) mengindikasikan bahwa pengeluaran untuk mencari sewa biasanya banyak lebih rendah dari nilai hadiah yang diperebutkan, atau yang lebih tepat disebut keuntungan pemberlakuan sitem rente. Setidaknya alasan inilah yang mempergiat usaha *rent seeker* dalam menawarkan jasa atau investasinya dalam proses pembangunan infrastruktur. Sifat kemudahan manipulasi seperti yang disebutkan diatas semakin diperparah dengan rasa acuh dari

12 Yoshihara, Kunio 1987, Kapitalisme Semu Asia Tenggara, Jakarta: LP3ES.

13 Jomo K.S. and Mushtaq Khan, *Rent-Seeking in Southeast Asia* : “Funny Money: Fiscal Policy, Rent-seeking, and Economic Performance in Indonesia” (Cambridge University Press, Cambridge, 2000) , pp. 248-273

sebuah negara sendiri atas eksistensi KKN. Di Indonesia sudah menjadi tradisi bahwa jabatan, pekerjaan, dan pendidikan seseorang akan berpengaruh besar dengan kemudahan akses masuk anggota keluarganya kedalam suatu jabatan, pekerjaan dan pendidikan yang sama. Sistem semacam ini tidak lagi butuh data empiris, namun telah menjadi rahasia publik. Meskipun tidak seluruhnya, kecenderungan individu untuk mengikuti apa yang dilakukan seniornya dalam hal *rent seeking* adalah sesuatu yang sangat mungkin.

Ketidaksiapan pembangunan infrastruktur dalam segi finansial juga menjadi salah satu faktor. Asa pemerintah dalam meraih mimpi pembangunan akan disambut baik oleh para investor atau kontraktor, yang kemudian akan terjadi konferensi namun lebih tepat disebut lelang mengenai mana yang beruntung dalam proyek tersebut. Banyak peneliti yang mengaku kesulitan dalam mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan *rent seeking*. Sebut saja Yoshihara Kunio yang mengaku beberapa kali ditolak oleh calon narasumber dalam usahanya membongkar kedok para usahawan terkemuka.¹⁴ Jawabannya sudah pasti karena tidak ada yang ingin menguak apa yang mereka rahasiakan selama ini.

3. Pengaruh Eksistensi Pemburu Rente Terhadap Kesehatan Kehidupan Ekonomi Suatu Negara

Pada dasarnya ekonomi suatu negara memang dipengaruhi oleh berbagai hal. Berkaitan dengan hal tersebut, aktivitas ekonomi perburuan rente dapat diartikan sebagai upaya individual atau kelompok untuk meningkatkan pendapatan melalui pemanfaatan regulasi pemerintah.¹⁵ Dalam konteks ekonomi kita terserang gejala *resource curse hypothesis*. Teori yang menjelaskan bahwa negara dengan kelimpahan sumberdaya alam malah seringkali terjerumus dalam kemiskinan yang dalam.¹⁶ Mengapa? Secara singkat ini adalah akibat dari penjarahan anggaran melalui

14 Yoshihara, Kunio 1987, Kapitalisme Semu Asia Tenggara, Jakarta: LP3ES.

15 Ahmad Erani Yustika, "Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori, dan Kebijakan" (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 107

16 <https://indonesiainimaji.com/dampak-buruk-mental-pemburu-rente-2/>

penggelembungan nilai proyek bahkan “fiktif”. Dasarnya adalah politik dan “harga diri” bersama yang telah Saya sebutkan sebelumnya, kemudian mulai menjangkiti semua sendi pemerintahan.

Secara lebih sederhana kegiatan memperkaya diri sendiri adalah salah satu bentuk *rent seeking*. Agaknya kebiasaan buruk ini didapat secara turun-temurun dari zaman penjajahan. Bagaimana tidak, monopoli sangat dekat dengan kegiatan kemitraan sedangkan kemitraan adalah jalan yang ditempuh pemerintah dalam pembangunan. Secara logika sudah pasti terjadi perbuatan semacam KKN, secara teknis hal tersebut sangat mudah mengingat segala fasilitas yang diberikan pada mitra/kontraktor, namun secara empiris sangat sulit memperoleh bukti. Terlepas dari legalitasnya sebagai koruptor yang “sah” dan apa yang mereka sebut sebagai politik balas budi, keputusan mengandalkan mereka oleh suatu negara justru membawa kearah kebocoran anggaran.

Lobi pemerintahan sudah dirancang bahkan sebelum proyek besar layaknya infrastruktur dimulai (Windradi & Setiono, 2019). Saya lebih suka menyebutnya “jual beli wewenang” yang secara sederhana dapat diperagakan sebagai berikut:

Jika X adalah seorang pemimpin yang baru menjabat, dikenal jujur, bijaksana dan amanah. Serta partai pengusungnya sangat disegani oleh partai lain karena memiliki kontribusi yang besar dalam pemerintahan. Tentu partai yang mengusung X memiliki jalinan sosial yang baik dengan partai yang pro dengannya agar mampu menghadapi kompetisi politik tim pemenangan yang bersebrangan. Situasi seperti inilah yang membuat X memiliki *back up* yang kuat ketika menjabat. Karena hal itu pula lah X memiliki kewajiban untuk menyejahterakan partisipan yang berperan untuknya. Kawajiban inilah yang memungkinkan X untuk melunturkan sifat jujur, bijaksana dan amanahnya dengan menjalin kerjasama keruh dengan kontraktor dalam hal pembangunan infrastruktur. X akan dengan mudah menjual kewenangannya sebagai pemimpin untuk memberi hak khusus kepada kontraktor dalam menjalankan misinya, dengan sejumlah keuntungan baginya dan kelompoknya.

Dengan persekongkolan semacam ini pihak kontraktor diuntungkan karena mereka mendapat kuasa penuh. Maka tidak heran banyak hasil proyek infrastruktur yang mutunya berbanding terbalik dengan dana yang digelontorkan. Buntutnya adalah kerusakan fatal yang bahkan tidak lama setelah peresmian. Bukannya mendapat respon positif, namun justru mendapat implikasi suram dari negara-negara lain. Selain itu, akan butuh dana tambahan untuk melakukan perbaikan, yang tentu tidak sedikit.

Meskipun banyak argumen yang menganggap pengadaan tanah adalah tindak lanjut dari *landreform*, namun bagi Saya hal tersebut sangat kontras. Karena mekanisme *rent seeking* berbeda, yang mana pemanfaatan tanah dalam *landreform* diserahkan pada penduduk lokal sedangkan pengadaan tanah justru menyerahkan tanah milik penduduk untuk negara. Perburuan rente dilakukan dengan cara terselubung, manuver ekonomi pemerintah kini telah terkontaminasi dengan kebutuhan politik dan kepentingan individu dari para penguasa. Selain kebocoran anggaran, masyarakat akan semakin merasa bahwa mereka tidak perlu menjadi pembayar pajak yang taat, tidak harus menjadi warga negara yang patuh terhadap tugas dan wewenang, karena mencontoh apa yang terjadi di kalangan pemerintahan.

Kasus suap juga sering menghiasi media massa sejalan dengan mangkraknya proyek infrastruktur di sejumlah tempat. Lini pemerintahan satu persatu berguguran karena anggotanya terjerat kasus yang sama. Defisit pendapatan negara semakin menjadi ketika masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Imbasnya kenaikan harga bahan bakar diarahkan menjadi solusi. Sayangnya pemerintah lupa, bahwa “mencegah lebih baik dari pada mengobati”. Kompleksitas dan kekeruhan praktik haram *rent seeking* perlu mendapat solusi yang sekurang-kurangnya mampu membuat pelakunya berfikir dua kali jika hendak melakukannya, walaupun tidak seketat hukuman mati yang digunakan oleh negara-negara berdisiplin tinggi. Sayangnya *rent seking* dalam praktiknya sangat sulit dikenali sebagai tindakan kriminal karena memang dasar pelaksanaannya adalah kerjasama.

Istilah kapitalis semu sedikit kurang tepat untuk menyebut kerjasama ini, meskipun secara teknis menyerupai tapi kepentingan pribadi dan golongan lebih mendominasi terlaksananya praktik *rent seeking*. Maka dari itu Saya lebih suka menyebutnya sebagai “jual beli wewenang” karena memang operasinya melibatkan literatur penting di suatu negara. Bukan hanya ekonomi, lebih jauh lagi kebobrokan birokrasi yang secara yuridis merupakan dampak yang berkesinambungan diatas kepentingan memperkaya diri ini sangat janggal dianulir. Sedangkan pergolakan sosial mulai bermunculan baik dengan aksi nyata berupa penyerangan orang-orang yang hendak menguak kedok mereka, terror dan intimidasi hingga pengeboman kediaman pribadi penyidik. Urgensi cita-cita pemerintah yang melakukan pembangunan infrastruktur demi perbaikan ekonomi adalah *non-sense* dengan masifnya peran *rent seeker* dalam pelaksanaannya.

PENUTUP

1. Simpulan

4. Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Kehidupan Masyarakat Dan Pembangunan Ekonomi Sebuah Negara

Positif :

- a. Mudahnya mobilitas penduduk dalam segala sektor
- b. Penurunan biaya pengiriman berbagai komoditas perdagangan
- c. Menjamin ketersediaan bahan yang membutuhkan jalur transportasi, sumber energi listrik, dan kemudahan dalam mendapatkan sumber air
- d. Perbaikan pendidikan, fasilitas kesehatan dan tata sosial yang baik
- e. Banyak bermunculan lapangan pekerjaan baru

Negatif :

- a. Banyak pengusaha sepanjang jalan atar kota/provinsi gulung tikar karena masyarakat beralih ke jalan tol.
- b. Berkurangnya daerah pertanian, perkebunan dan lahan terbuka hijau

- c. Banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian
 - d. Keterpurukan mendalam bagi masyarakat yang kurang berpendidikan
 - e. Banyaknya bencana alam akibat pemanfaatan lahan yang tidak tepat.
- 5. Sebab Suatu Negara Cenderung Melibatkan Pemburu Rente Dalam Pembangunan Infrastruktur Dan Ekonomi**
- a. Kemudahan manipulasi anggaran pembangunan infrastruktur
 - b. Sifat turun-temurun pemerintahan peninggalan era Soeharto membangun akses pertahanan kekuasaan dan pemupukan kekayaan
 - c. Penggunaan sistem ekonomi perdagangan terbuka sebagai dampak dari adaptasi global
 - d. *Public choice* yang rancu dengan politik dan “harga diri” terkait praktik “jual beli wewenang”
 - e. Sifat kemitraan dan sistem balas budi *rent seeker* yang menghasut
 - f. Modal pemburu rente relatif lebih rendah dari apa yang mampu mereka dapat, sehingga memotifasi mereka untuk selalu melakukan kecurangan.
- 6. Pengaruh Eksistensi Pemburu Rente Terhadap Kesehatan Kehidupan Ekonomi Suatu Negara**
- a. Keterpurukan birokrasi membuat negara terserang *resource curse hypothesis*
 - b. Kebocoran anggaran dan keruhnya sistem keuangan negara akibat banyak penggelembungan dana bahkan proyek “fiktif”
 - c. Timbul kerugian yang harus ditanggung pemerintah untuk melakukan renovasi mendadak proyek yang menjadi korban
 - d. Secara tidak langsung mengurangi pendapatan negara, sebagai buntut dari masyarakat yang kehilangan kepercayaan dan sengaja lalai membayar pajak
 - e. Kenaikan harga bahan bakar dan berbagai komoditas sebagai dampak dari usaha pemerintah dalam memulihkan keuangan negara
 - f. Implikasi suram dari negara-negara yang menjalin kerjasama bilateral maupun multilateral

- g. Ketidakjelasan sistem keuangan negara dapat mengakibatkan defisit berkepanjangan yang kemudian dapat menyebabkan penumpukan hutang luar negeri.
- h. Efek jangka panjangnya adalah rendahnya nilai tukar rupiah dengan dolar.

2. Rekomendasi

Dunia ekonomi dan politik dalam pemerintahan di Indonesia belakangan ini sangat sukar diurai. Manuver ekonomi yang ditempuh masih belum mampu membangkitkan Indonesia karena masih terkontaminasi dengan dunia politik “harga diri” dan “jual beli wewenang”. Pada kesempatan ini Saya berusaha menawarkan perencanaan pembangunan infrastruktur secara komprehensif, yang menitikberatkan pada proyeksi dan prediksi keuangan sebelum diimplementasikan. Studi kelayakan dan berbagai potensi hambatan di lapangan juga berperan penting dalam hal ini. Selain itu, kebijakan struktural pemerintah mengenai pembangunan harus dapat mengaktualisasikan sasaran dibentuknya, sehingga masyarakat yakin akan manuver ekonomi pembangunan yang dituju pemerintah. Pada dasarnya hal ini harus didukung dengan basis legitimasi yang melibatkan publik dengan maksud adanya transparansi suatu proyek negara, sehingga masyarakat tidak merasa termanipulasi oleh kebijakan pemerintah dengan adanya praktik *rent seeking* atau perburuan rente.

DAFTAR PUSTAKA

- Chen, 2007; Su et al., 2014; Liu et al., .2014. Dalam jurnal terindex scopus “*Land Use Policy*”
- Fang,Jiang. Et al.2007. “*Measuring Urban Sprawl In Beijing With Geo-Spatial Indices*” Journal of Geographical Sciences (J GEOGR SCI)
- Irawan ,Andi. 2008. “*Rent Seeking Para Pejabat Publik*” Jawa Pos : Indonesia Corruption Watch Julia, Roxana . Duchin,Faye. 2013 .“*Land Use Change and Global Adaptations to Climate Change*” Switzerland : sustainability journal
- Khan, Mushtaq H. 2004.“*Corruption, Governance and Economic Development*” (in Jomo, KS and Ben Fine (eds) 2004. *The New Development Economics* . New Delhi: Tulika Press and London: Zed Press)
- Khan, Mushtaq in Jomo K.S .2000. *Rent-Seeking in Southeast Asia : “Funny Money: Fiscal Policy, Rent-seeking, and Economic Performance in Indonesia”* Cambridge University Press, Cambridge
- Kunio ,Yoshihara. 1987.“*Kapitalisme Semu Asia Tenggara*” Jakarta: LP3ES
- Lenin,V.I. 1964 “*On the ‘Unauthorised Seizure’ of Land: Flimsy Arguments of the Socialist Revolutionaries*” in Lenin Collected Works 24 Moscow: Progress Publishers
- Merilee S. Grindle. 1989.“*The New Political Economy : Positives Economics and Negatives Politics*” Working Paper,Country Economic Department:The World Bank
- Muhaimin,Yahya. 1991 .“*Bisnis dan Politik*” Jakarta : LP3S
- Posada , [Alejandro](#). and Chen,George. 2017“*Publishers are increasingly in control of scholarly infrastructure and why we should care A Case Study of Elsevier*” University of Toronto Scarborough: Geopolitics of Academic Production
- Ricardi S. Adnan. 2014. “*Dinamika Struktur-Agensi dalam Perkembangan Industri Otomotif Indonesia*” Pusat kajian sosiologi : Jurnal Sosiologi MASYARAKAT
- Ridha, Muhammad. 2016. “*Ekonomi Politik Pembangunan Infrastruktur Dan Kepentingan Kapital*” Jurnal Politik Profetik

- Staniland, Martin. 1985. *“What is Political Economy?”* New Heaven: Yale University Press
- Stone.1974. *“American Public Works Association”* Dalam Kodoatie,R.J.2005
- Widanarto, A. 2017. *“Praktek Rent Seeking : Budaya Korupsi Baru Di Kalangan Politisi Dan Birokrasi Indonesia”* jurnal politikum indonesia
- Yustika, Ahmad Erani. 2012. *“Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori, dan Kebijakan”* Jakarta:Erlangga
- Zhoua, Yang. et al. 2019. *“Land consolidation boosting poverty alleviation in China: Theory and practice”* Elsevier : *Land Use Policy* Indexed by Scopus [Volume 82](#)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (online)
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Hotman Sidauruk “Tanah Untuk Kepentingan Umum” dimuat pada 03/04/2018
<https://kppip.go.id/opini/tanah-untuk-kepentingan-umum/>
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012”
<http://kpa.or.id/assets/uploads/files/publikasi/4ba78-uu-no-2-th-2012-pengadaan-tanah-bagi-kepentingan-umum.pdf>
- Ecorlaw.com “Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dan Proses Konsinyasi”
http://www.ercolaw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=70:pengadaan-tanah-untuk-kepentingan-umum-dan-proses-konsinyasi&catid=29:the-cms&Itemid=50
- “On the “Unauthorised Seizure” of Land Flimsy Arguments Of The Socialist Revolutionaries”
<http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/may/20b.htm>
- Halim ,Lidwina.**“Tata Cara Pengadaan Tanah”
<https://www.hukumproperti.com/pertanahan/tata-cara-pengadaan-tanah/>
- Subandriyo,Toto “Politik, Kekuasaan, dan Pemburu Rente” Dimuat pada 31/12/2015
<https://id.beritasatu.com/home/politik-kekuasaan-dan-perburuan-rente/136434>

Universitas Kristen Satya wacana “Parasit Pembangunan”

http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/6249/11/D_902007008_BAB%20X.pdf

Wulandari “Motif dan Prinsip Ekonomi” Dimuat pada Juli 2014

<https://ulwulan17.wordpress.com/artikel/ekonomi-akuntansi/motif-dan-prinsip-ekonomi/>

Headlines Opini “Masukan Untuk Politik Infrastruktur Jokowi” Dumiat Pada 19/7/2017

<http://www.berdikarionline.com/politik-infrastruktur-siapa/>

Wikipedia.org “Infrastruktur” Terakhir diubah pada 9/10/2018

<https://id.wikipedia.org/wiki/Infrastruktur>

Radarplanologi.com “Infrastruktur Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia”

Dimuat pada November 2015

<http://www.radarplanologi.com/2015/11/infrastruktur-dalam-pembangunan-ekonomi-indonesia.html>

Radarplanologi.com “Pengertian Infrastruktur, Sistem dan juga Komponennya”

Dimuat pada Oktober 2015

<http://www.radarplanologi.com/2015/10/apa-itu-infrastruktur.html>

Kuwado,Fabian Januarius “4 Tahun Jokowi-JK dan Catatan Pembangunan Infrastruktur” Dimuat pada 20/10/2018

<https://nasional.kompas.com/read/2018/10/20/14144381/4-tahun-jokowi-jk-dan-catatan-pembangunan-infrastruktur?page=all>

Wikipedia.org “Kebijakan” Terakhir diubah pada 7/11/2018

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan>

Pengertianahli.id “Pengertian Kebijakan Menurut para Ahli” Dimuat pada bulan Agustus 2014

<http://pengertianahli.id/2014/08/pengertian-kebijakan-menurut-para-ahli.html#>

Murhan “Diduga Proyek Infrastruktur Berpotensi Korupsi Diingatkan ICW, 2017

Ada 241 Kasus” Dimuat pada 18/7/2018

<http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/07/18/diduga-proyek-infrastruktur-berpotensi-korupsi-diingatikan-icw-2017-ada-241-kasus>.

Indonesiainimaji.com "Dampak Buruk Mentalitas Pemburu Rente" Dimuat Pada 28/4/2018

<https://indonesiainimaji.com/dampak-buruk-mental-pemburu-rente-2/>

Aulia, G. P., & Kawuryan, E. S. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Cessie Dalam Melakukan Balik Nama Sertipikat Hak Atas Tanah Dan Bangunan. *Transparansi Hukum*, 1(1), 79–98. <https://doi.org/10.30737/transparansi.v1i1.170>

Bahroni, A. (2018). Hak Penambangan Pasir Oleh Masyarakat Lokal di Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. *Transparansi Hukum*, 1(2), 152–168. <https://doi.org/10.30737/transparansi.v1i2.242>

Windradi, F., & Setiono, G. C. (2019). Konsekuensi Yuridis Jual Beli Tanah Yang Dibebeani Hak Tanggungan. *Transparansi Hukum*, Vol 1(1), 45–66.

Windradi, F., & Wahyuni, N. (2018). Konsep Pengaturan Dan Ratifikasi Batas Kedaulatan Wilayah Laut Negara Kesatuan Ri Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Transparansi Hukum*, Vol 3(No 1), 122–137.